

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	ii
Halaman Pengesahan Promotor Dan Co-Oromotor .....	iii
Halaman Surat Pernyataan .....	iv
Kata Pengantar.....	v-vii
MOTTO Dan Persembahan.....	viii
<i>Glossar</i> .....	ix-xi
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i> .....	xii- xiii
Daftar Isi .....	xiv-xxiv
Daftar Tabel .....	xxv
Daftar diagram. ....	xxvi
DAFTAR Singkatan .....	xxvii
BAB I. PENDAHULUAN. ....	1
A . Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka-Teori .....	25
I. <i>Grand Theory</i> (Teori Utama) .....	25
1.1. Teori Keadilan Pancasila .....	26
1.2. Teori keadilan menurut hukum Islam .....	36
1.3. Teori keadilam menurut Filsuf Barat .....	50

2. <i>Middle Theory</i> (teori Penghubung) .....	59
a. Teori hukum Perlindungan .....	59
b. Teori kemaslahatan .....	62
3. <i>Applied Theory</i> (teori Terapan).....	65
a. Teori hukum Progresif .....	65
b. Teori Double Movement .....	71
G. Kerangka Pemikiran.....	79
H. Metode Penelitian .....	80
1. Paradigma Penelitian .....	80
2. Spesifikasi Penelitian .....	82
3. Metode Pendekatan .....	83
4. Sumber Data Penelitian .....	83
5. Teknik Pengambilan Data .....	87
6. Analisis Data.....	88
I. Orisionalitas .....	88
J. Sistematika Penulisan Disertasi.....	94
 BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A Lembaga Pemasarakatan, Sejarah dan Perkembangannya.....	97
1. Sejarah Kepenjaraan Abad Ke XVIII .....	98
1.1. Penjara sistem <i>Pennsylvania</i> . .....	98
1.2. Penjara sistem <i>Auburn</i> .....	99
1.3. Penjara <i>The Mark system</i> .....	100
1.4. Penjara <i>Irish Progressive system</i> .....	101
1.5. Sistem Elmira.....	103

2. Sejarah Perkembangan Pemasarakatan di Indonesia.....	104
2.1. Lembaga Pemasarakatan di Masa Pra Kemerdekaan .....	104
2.2. Lembaga Pemasarakatan pada Masa Penjajahan di Indonesia .....	106
2,2.1. Priode Pemerintahan Kolonial Belanda .....	109
2.2.2. Priode setelah berlakunya KUHP 1918 .....	113
2.2.3. Priode Pendudukan Jepang ,.....	114
3 . Pemasarakatan Pada Masa Kemerdeka.....	116

## **B. Dasar Hukum Terbentuknya Lembaga Pemasarakatan**

1. Pancasila .....	119
2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .....	121
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan .....	124
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	129
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindunga Anak .....	131
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan .....	X 136
7. Peraturan Pemerintah RI nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak wargabinaan pemasarakatan .....	142

**C. Instrumen Internasional Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Standar Peradilan Anak**

1. Instrumen Internasional Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	146
A . Konvensi Tentang Hak-Hak Anak ( <i>Convention On The Right Of The Child</i> ) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 Yang Diratifikasi Dengan Keputusan Presiden RI 36 Tahun 1990 Salah Satu Pertimbangan Dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	147
b Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam , Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia ( <i>Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment</i> ) 10 Desember 1984 Yang Telah Diratifikasi Oleh Pemerintah Indonesia Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 .....	149
c .Konvensi International Tentang Hak-Hak Sipil DanPolitik ( <i>International Covennant On Civil Political</i> ) Resolusi Majelis Umum Pbb Nomor 12200 A (Xxx) Tanggal 16 Desember 1976 Telah Diratifikasi Oleh Pemerintah Republik Indonesia Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak SipiDanPolitik .....	151
d . Konvensi Hak-hak anak ( <i>Convention On The Rights Of Child</i> ) Resolusi Maajelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 .....	152
<b>2. Instrumen Internasional Tentang Standar Peradilan Anak</b>	
2.1. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa ( <i>United Nations Atandard Minimum Rules For The Administrativ Of Juvanile Justice</i> ) “ <i>Beijing Rules</i> ” Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33, Tanggal 29 November 1985 .....	154

2.2. Aturan-aturan tingkahlaku Petugas Penegak hukum ( <i>code of Conduuct for lau enforcement officials</i> ) Resolusi Majelis Umum PBB, tanggal 17 Desenber 1979 .....	156
2.3. Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana ( <i>Standar Mibimun Rules The Trectment Of Prisoners</i> ) , Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 553 C XXIV, Tanggal 31 Juli 1957.....	157
2.4. Peraturan PBB Bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasan ( <i>Rules Fo r The Protection Of Juvenilis Deperiod Of Their liberty</i> ), Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/113, tanggal 14 November 1990.....	159

### BAB III. PENGANTURAN HUKUM TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIDAK MENGAKOMODIR HAK-HAK ANAK. .

A. Pengaturan Hukum tentang Pembinaan Narapidana Ana di Lembaga Pemasyarakatan .....	163
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. ....	165
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 ahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	174
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan .....	180
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat .....	188

5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan.....	191
6. Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (DIRJENPAS). .....	194
B. Implementasi Pengaturan Hukum Tentang Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan .....	199
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. ....	200
2. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....	203
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M 02.PK.04.10 tanggal 10 April 1999 tentang Keputusan Menteri Pola Pembinaan/Tahanan .....	205
C. Hak-hak Narapidana Anak di lembaga Pemasyarakatan yang Tidak Terakomodir .....	207
1. Prinsip - prinsip yang dijalani pada Lembaga Pemasyarakatan. ....	207
a.. Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Untuk Beribadah .....	208
b. Warga Binaan Pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Untuk Mendapatkan Perawatan Rohani Dan Perawatan Jasmani .....	208
c. Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran` .....	210
d. Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Pelayanan Kesehatan dan Makanan .....	211

e. Warga binaan pemsyarakatan berhak untuk menyampaikan keluhan. ....	215
f. Warga Binaan Pemsyarakatan Berhak Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Siaran Media Massa .....	216
g. Warga Binaan Pemsyarakatan Berhak Mendapatkan Upah Atau Premi Bagi Yang Bekerja Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan .....	217
h. Warga Binaan Pemsyarakatan Berhak Menerima Kunjungan Dari Keluarga, Penasehat Hukum atau Orang-Orang Tertentu. Lainnya .....	218
i. Warga Binaan Pemsyarakatan Berhak Mendapatkan Remisi .....	219
j. Warga binaan pemsyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi dan Cuti Warga Binaan Pemsyarakatan Berhak Mendapatkan Pembebasan Bersyarat. ....	220
k. warga Binaan Pemsyarakatan Berhak Mendapatkan Cuti Menjelang Bebas .....	221
l. Warga binaan pemsyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi dan Cuti .....	222
m. Hak-Hak lainnya Berpolitik, dan Hak Keperdataan Seperti Surat Menyurat. ....	223
<b>2. Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemsyarakatan</b>	
2.1. Instrumen Perundang-undangan.....	226
2.2 Sarana Gedung Pemsyarakatan. ....	227
2.3. Pembinaan Narapidana .....	228
2.4. Petugas Pemsyarakatan .....	228

3. Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan .....	229
--	-----

**BAB IV. PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PEMBINAAN NARA  
PIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
SEHINGGA TIDAK TERPENUHINYA HAK - HAK  
NARAPIDANA ANAK**

**A Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sarana Pembinaan**

Narapidana Anak .....	231
-----------------------	-----

1. Kelemahan-kelemahan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan .....	237
--	-----

a fisik Bangunan Lembaga Pemasyarakatan .....	237
---	-----

b Keadaan <i>OverKapasitadi</i> LembagaPemasyarakatan .....	239
---	-----

c. Sarana Pembinaan dan Kerja di Lembaga Pmasyarakatan.....	241
--	-----

2. Lembaga Pemasyarakatan dan Pejabat Serta Petugas (SDM) .....	242
--	-----

....

a. Dinamikan Permasalahan Pemasyarakatan .....	242
--	-----

b. Penyimpangan - penyimpangan yang terjadi di LAPAS .....	246
---	-----

c. Proses Pembinaan di LAPAS .....	247
------------------------------------	-----

3. Keadaan Narapidana dan Petugas LAPAS di Lembaga Pemasyarakatan .....	251
--	-----

1) Keadaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan .....	251
---	-----

2) Tugas dan peranan anggota personil serta pejabat LAPAS di Lembaga Pemasyarakatan .....	254
--	-----



3) Tugas Anggota Personil di Lembaga Pemasyarakatan .....	255
4) Peranan KALAPAS di Lembaga Pemasyarakatan .....	262
<b>B. Problematika Metoda Pembinaan menurut peraturan perundang- undangan</b>	
1. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS .....	265
2. Pembenahan pada Lembaga Pemasyarakatan .....	271
3. Pengawasan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) .....	274
4. Perlu dilakukan peningkatan fasilitas bagi warga binaan pemasyarakatan. ....	276
a. Pembenahan Gedung LAPAS .....	276
b. Keterampilan sesuai dengan bakat narapidana .....	277
<b>C. Yang menjadi problematika sehingga hak-hak narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan tidak terpenuhi.</b>	
1. Problematika pada Lembaga Pemasyarakatan .....	279
1.1. Kepemimpinan KALAPAS.....	285
1.2. Kualitas dan Kuantitas Petugas .....	286
1.3. Sarana/fasilitas pembinaan .....	289
1.4. Anggaran/dana untuk pelaksanaan pembinaan narapidana. ....	290
1.5. Kualitas dan ragam program pembinaan .....	292
2. Problematika pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan .....	293
a) Sikap acuh tak acuh masyarakat .....	293

b) Kurangnya partisipasi masyarakat .....	294
c) Kurangnya kerja sama dengan instansi/badan terkait dalam upaya pembinaan .....	294
d) Adanya informasi/pemberitaan yang tidak seimbang yang cenderung mendiskriminasi LAPAS .....	295

## BAB V. REKONSTRUKSI KOSEP PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG BERKEADILAN

A. Filosofis Pembinaan Narapidana Anak Di Indonesia Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 .....	298
1. Beberapa kelemahan konsep pembinaan narapidana anak dilembaga masyarakatan .....	305
2. Hambatan proses pembinaan di dalam dan luar lembaga masyarakatan .....	313
B. Sanksi dan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Masyarakatan diberbagai .....	316
1. Sanksi Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Belanda.....	318
2. Sanksi Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Yugoslavia.....	326
3.. Sanksi Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Jepang .....	333
C. Rekonstruksi Konsep Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Masyarakatan yang Berkeadilan. ....	345
1. Pemikiran pembaharuan sistem pemidanaan anak di Indonesia .....	345
2. Wacana Konsep pembinaan narapidana anak di Lembaga masyarakatan di masa yang akan datang.....	356

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	368
B. Implikasi Kajian Disertasi .....	371
1. Implikasi teoritis.....	371
2. Implikasi Praktis, .....	374
C. Saran .....	375
DAFTAR PUSTAKA.....	377
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
INDEKS PROPOSAL	

DAFTAR TABEL

## HALAMAN

1 .TABEL I	: Karya Ilmiah pembanding yang memiliki relevansi dengan disertasi .....	89
2. TABEL II	: Daftar Menu Makanan Narapidana -DIRJENPAS .....	214
3. TABEL III	: Daftar Menu Makanan Sehari-hari Per-Minggu Pada Lembaga Pemasyarakatan Langsa.....	215
4. TABEL IV	: Program Pembinaan Anak Pidana Jangka Panjang.....	340
5. TABEL V	: Rekonstruksi Konsep Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Keadilan.....	356
6. TABEL VI	: Rekonstruksi Norma pada Pasal 5 huruf f dan g pada UU No 12 Thn 1995 .....	358

## DAFTAR DIAGRAM

HALAMAN

1. DIAGRAM I : Kerangka Pemikiran .....	79
2. DIAGRAM II : Struktur Organisasi lembaga pemasyarakatan Kelas II-B Langsa .....	256
3. DIAGRAM III : Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang .....	260